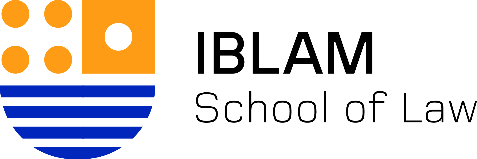
**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKAT DAN PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Ramadhan Dimas Pratama**

**NPM : 1927350087**

**Diajukan kepada :**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**JAKARTA**

**2023**

**LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**Ramadhan Dimas Pratama**

**NPM : 1927350087**

Judul :

**ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKAT DAN PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Secara subtansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, Juni 2023

Pembimbing

**Andriana Kusumawati, S.H., M.H**

Halaman Pengesahan Sidang Tugas Akhir

**ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKAT DAN PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Disusun Oleh:

**Ramadhan Dimas Pratama**

**NPM : 1927350087**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal………….. dan dinyatakan LULUS

Ketua Penguji

……………………….

NIDN

Tim Penguji I Tim Penguji II

……………………………… ………………………………

NIDN : NIDN :

Mengetahui dan Menyetujui, Jakarta, …………2023

Wakil Ketua I

**Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H NIDN : 0306118304**

Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H NIDN : 0322066102**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ramadhan Dimas Pratama

NPM : 1927350087

Judul : Analisis Pemahaman Sertifikat Dan Pencantuman Label Halal Pada Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tugas akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Berikut dengan hasil cek plagiasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapar penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Juni 2023

Materai

**Ramadhan Dimas Pratama**

***ANALYSIS OF UNDERSTANDING OF CERTIFICATES AND INCLUDING OF HALAL LABELS ON FOOD PRODUCTS AS A FORM OF CONSUMER PROTECTION***

**ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKAT DAN PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Ramadhan Dimas Pratama**

**Andriana Kusumawati**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM (*School of Law*)**

***Abstract***

*Assurance of halal products for food products circulating widely in Indonesia important antetion of indonesia which has a Muslim majority population, considering that currently many food products circulating in Indonesia are not yet clear about their halal status. Providing halal certificates through food labels and advertisements on food products is source cannot directly meet the business actors. Halal food is food that complies addtivies by Muslim communities. The formulation of the problem that the author discusses is: 1) What are the provisions for food products that must be certified and labeled as halal according to statutory regulations? and 2) What are the legal consequences if producers distribute food products that are not certified and labeled as halal?Methode reaserch use normative, namely reaserch priority second data. Based on result prosedure has been field, then bisunes actor maintain Halal article imprisonment max five years in two bilion rupiahs.*

***Keywords: Certificate and Listing, Halal, Consumer Protection***

**Abstrak**

Jaminan akan barang yang halal pada makanan luas di Indonesia, menjadi hal yang krusial dan menjadi perhatian Negara Indonesia berpenduduk mayoritas muslim. Belum banyak makanan yang bersetipikat halal dari label dan iklan menjadi acuan sumber produk pangan usahanya. Pangan halal adalam pemenuhan syarat bahan baku tambahan, dengan konsumsi muslim. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah: 1) Bagaimana ketentuan produk pangan wajib bersertifikat dan berlabel halal menurut peraturan perundang-undangan? dan 2) Bagaimana akibat hukum jika produsen mengedarkan produk pangan yang tidak bersertifikat dan berlabel halal?. Metode kajian yang penulis pakai yaitu yuridis normatif, dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Akibat hukum jika produsen mengedarkan produk pangan, dengan perolehan sertifikasi halal yang dimaksudkan dengan pidana dan denda hingga dua milyar.

**Kata Kunci: Sertifikat dan Pencantuman, Halal, Perlindungan Konsumen**

1. **PENDAHULUAN**

Jaminan akan produk halal terhadap produk makanan yang beredar luas menjadi yang krusial, dengan perhatian dari Negara. Hal ini dengan memperhatikan banyaknya makanan yang ada di Indonesia, belum jelas halal ataupun tidaknya, wajib hukumnya halal sebuah produk itu menjadi keperluan masyarakat, baik dari pangan, obat dan barang yang dikonsumsi. (Nasution, 2016)

Dasar negara menyebutkan jika kewajiban segena bangsa dan tumpah darah dari kemakmuran yang sifatnya umum. Landasan ini dengan dipertegasnya dari Pasal 29, UUD 1945. (Undang-Undang Dasar RI, 1945)

Sebagai negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, masyarakat yang mulai resah dengan hal yang tidak terjamin kehalaannya. Memberikan sertifikasi halal dari label dan iklan dari sebuah produk. Akan tetapi juga dipakai menjadi pertimbangan bagi pembeli untuk melakukan pembelian.(Shofie, 2015)

Pangan halal merupakan pangan yang sesua dengan syariat islam, baik dari bahan baku ataupun cara produksi menjadi pangan bagi masyarakat yang notabenenya muslim.(Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007)

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan bakupangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasukbahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, danyang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.(Huda et al., 2020)

Sertifikasi ialah aktivitas untuk menguji sistem pengetahuan sebuah produk dengan perusahaan, dan pemenuhan ketentuan halal ataupun tidaknya. Hasil dari kegiatan tersebut, dengan tanda jika barang dalam keadaan dan kaidah yang halal. Output nya dengan pencantuman label produksi dari kemasan.

Dasarnya, dengan hak konsumen yang dilakukan pemilihan. Terkhusus agar pembeli bebas dari bahan yang tidak halal. Perkembangannya, teknologi olah dan kemasan barang ini, dengan sistem label yang sifatnya mutlak. Sertidfikasi ini dengan kenalnya bahan baku dan komposisi dari bagian yang menyeluruh.

Rujukan pada Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, jika konsumen memiliki hak dari informasi yang semestinya, jelas dan jujur tentang keadaan dan penjaminan suatu barang, konsumen memiliki hak dan diwajibkan dalam pemberian ruang dan peluang bagi masyarakat dan pemli olah agar tidak menemukan zat haram. (Undang-Undang Nomor 8, 1999)

Kenyataannya, banyaknya produsesn memiliki sertifikat dalam barang sebuah perusahaan, orang mengambil jalan pintas untuk sebuah hal yang menguntungkan. Proses produksinya, dengan memakai bahan tambahan, bahan kimia dan juga menghalalkan beragam usaha. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)

Lahirnya regulasi mengenai jaminan produk halal, ikut dengan penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk halal, pelaksanaan ketentuannya dengan mempertegas terdesaknya soal halal ataupun haram makanan yang menjadi konsumsi. Hal ini, dengan diecek ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuannya, dengan tujuan agar pembeli memperoleh kepastian hukum dari jaminan dan acuan olah dan proses produksi. (May Lim Charity, 2017)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana ketentuan produk pangan wajib bersertifikat dan berlabel halal menurut peraturan perundang-undangan? dan 2) Bagaimana akibat hukum jika produsen mengedarkan produk pangan yang tidak bersertifikat dan berlabel halal?

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis yang dipergunakan yaitu yuridis normatid, merupakan analisa yang terkait dengan undang undang dan teori hukum yang diberlakukan. Kajian ini dengan analisa permasalahan hukum, kenyataan ataupun gejala hukum yang terkait. Kajian ini dengan bentuk deskriptif, analisis dengan penggambaran obyek, pencantuman label produk pangan. (Soerjono, 2010) Bahan hukum yang dipakai pada kajian ini dengan norma dan kaidah, contohnya aturan undang-undang, risalahan dan kajian penulisan. (Mahmud Marzuki, 2010)

1. **PEMBAHASAN**

**Ketentuan Produk Pangan Wajib Bersertifikat Dan Berlabel Halal Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

1. **Legalitas LPPOM MUI**

LPPOM MUI merupakan organisasi yang resmi, dengan pendirian pada 6 Januari 1989. Bentuk organisasi ini berdasar dari UB. Kajian ini dengan produk makanan, contohnya susu, mie dan yang lainnya. *Reverse proof* merupakan yang terkonsep halal dari barang dan asumsi jika barang olah dengan kecenderungan terkontaminasi. Dikarenakan hal tersebut, sertifikasi halal tak perlu penerapan barang dengan contoh buah, sayur, ikan segar dan lain. (Aminuddin, 2016)

Pemberlakuan UU No. 33 tahun 2014 mengenai produk yang dilakukan impor, dengan Pasal 4 menyebutkan, impor, peredaran dan dagang di wilayah Indonesia, diharuskan dengan sertifikat halal. Produk ini dilakukan pengawasan oleh pemerintah dalam jangka waktu. Jaminan nya dengan penjualan barang dengan lebel. Pelanggaran yang dilakukan terncatum pada Pasal 21 hingga 47ayat (3). (May Lim Charity, 2017)

Beralaskan dari analisis regulasinya, sudah ada yang berubah. Hilangnya dualitas organisasi dengan manajemen sertifikasi tersebt. Pengeluaran jaminan dengan menugaskan implementasi produk, penerbitan label. Saat sekarang ini dengan manajemen BPJPH. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

1. Label Halal Pada Produk Pangan (Kemasan) Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim

Produsen tak hanya dimengerti, sebaga pihak yang membuat ataupun memperoleh barang saja. Namun hal lainnya, dimengerti secara umum. Seperti, korelasi barang dengan hasil industri, proses pengadaan. Pabrik, distributornya dan lainnya yang berbadan hukum ataupun tidak. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)

Kewajiban pelaku usaha dalam pemberian informasi yang semestinya, jelas dan jujur tentang keadaan jaminan barang ataupun pelayanan dan dipaparkan penggunanya. Tiadanya informasi dengan tak memadai ataupun dirugikannya pembeli. Krusialnya informasi tersebut, dengan instruksi. Maksud perlindungan ini dengan harkat dan martaban konsumennya dari dampak yang tidak baik dari pelaku usaha. Dikarenakan hal tersebut, penentuan beragam larangan Pasal , dengan produksi, dagang dan pelayanan dari labelnya. (Undang-Undang Nomor 8, 1999)

Prinsi yang timbul dari kedudukan dan hubungan hukum pelaku usaha ini dengan teori: prinsip let the buyer beware , hingga butuh proteksi apapun bagi pembeli, dengan kehati-hatian pada barang, memiliki yang wajib, dengan dilangsungkannya kontrak dan penentapan eksisteninya. (Shofie, 2015)

Tanggung jawab yang dipunyai pihak, dengan hubungan para pihak. UUPK ini dengan tanggungjawab, kontrak dan lainnya. Regulasi menyebutkan dalam Pasal 7, jika produsen berkewajiban untuk semua kegiatan. UUPK juga menyebutkan mengenai ganti kerugian. Wajib dengan lekat pada pembeli yang setuju dahulunya.

Hasil kajian kemudian diperhatikan cantuman barang pangan kemasan pasaran, yaitu label halal dengan huruf latin arab, logo halalnya MUI. Standarisasi itu resmi dikeluarkan oleh MUI dengan ada nomornya. Label ini dikeluarkan untuk memeriksa kehalalan sebuah barang. (Nasution, 2016)

Beralaskan ketentuannya dengan label halal, utama sekali dengan memohonkan halal dari sebuah barang. Berikutnya memeriksa dan mengkaji LPPOM MUI, memeriksa dan kajian itu dengan kemudian dimintakan fatwanya. (Nasution, 2016)

Pasca fatwa MUI dengan sertifikat dan pembayaran biaya untuk memeriksa penentuan barang lulus uji. Pemeriksaan itu dilakukan pada bahan yang dipakai dengan produksi sebuah barang yang dengan memeriksa barang pangan yang diminta bersama dari BPOM tentang cara produksi, kemudian label bahan BPOM menjadi syarat yang sifatnya mutlak. (Undang-Undang Nomor 36, 2009)

Perhatian pembeli, senantiassa dengan pemilihan barang pangan dengan label halal, dengan beredar pada pasaran, memeriksa pihak yang memiliki kewenangan, penjaminan barang yang halal. Pembuktian jika hak konsumen itu dituangkan pada Pasal 7, mengenai itikad baik usaha dan pemberian informasi yang mumpuni dari pelayanannya. (Aminuddin, 2016)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produsen melangsungkan aktivitas dengan larangan:

a. Tak ada pemenuhan, tak sesuai dengan keadaan, jaminan dan pernyataan yang dipaparkan;

b. Tidak ikut ketentuannya yang dinyatakan halal dari label. (Undang-Undang Nomor 8, 1999)

Ketentuannya, dengan pernyataan yang menjadi syarat penerapan kehalalan label, perolehan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, dengan konsumsi dan memakai barang terkait. Beralaskan ketentuan dengan larangan dagang pelayanan diwajibkan dengan penarikan yang beredarnya.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan, dengan pernyataan jika permasalahan korelasi kesehatan saja, butuh informasi yang semestinya dengan menyesatkan label dengan mayoritas dengan halal. Kepentingan agama, dengan keyakinan dengan ketetapan tanggungan masuk pada pangan Indonesia. (Evianto, 2016)

Beralaskan kajian dan faktor hambatan dari konsumen :

a. Dasar hukum dari label ini masih lemah, diwajibkan dengan pengemasan dengan maksud perdagangan yang semestinya. Pangan yang masuk ke Indonesia, dengan istilah Pasal 30, mengenai label yang muatnya: nama dari barang, muatanya, bobotnya dan pemaparannya.

(Undang-Undang Nomor 18, 2012)

b. Pemaparan halal itu dari Pasal 30, dengan keterangan pangan yang dicantumkan. Aturannya dengan PP Label.

Perhatian pasal dengan pemberian pengertian, dicantumkan dengan sifat sukarela, akan tetapi masuk pada pangan wilayah denga produk. Pencantuman halal ini, dengan angapan dan maksud tanggungjawab.

Aturan pencantuman label ini dari barang pangan. Namun produsen juga mencantumkan. Kebenarannya, dengan pernyataan bahan baku, tambahan pangan dan lainnya. Perkembangan teknologi yang lengkap dengan bahan baku. Dibutuhkan keahlian bidang dari agama islam. (May Lim Charity, 2017)

1. **PEMBAHASAN**

Akibat Hukum Jika Produsen Mengedarkan Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Dan Berlabel Halal

1. Sanksi Jika Tidak Mencantumkan Produk Halal

Diputusnya yang wajib, tidak serta merta membuat keseluruhan pemenuhan yang wajib pula. Keputusan itu kemudian dari pelaku usaha dan halal sanksinya. Keluar kebijakan dan yang wajib dari produk halal. Lima tahun itu dengan kelembagaan dan membina produsen dengan edukasi yang sifatnya masif.

Sanski dari produk halal dengan sertifikasi halal. Pasal 27 dengan pencantuman label halal dan administratif, dari perigatan tertulis, denda dengan mencabut logo halal. (Undang-Undang Nomor 18, 2012)

Pasal 2 dengan pemaparan jika produk dengan asal bahan yang haram tanpa dikecualikan. Pelaku usaha diwajibkan dengan pemaparan halal tersebut. Pengedaran dengan pemenuhan yang wajib, dengan Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi.

Tiap pelakunya, dengan kewajiban melakukan sertifikasi halal dari UU Nomor 31 Tahun 2014. Namun, penerapannya yang wajib memiliki tahap. Sanksi pencantuman produk halal ini dengan perolehan dari produk. (Undang-Undang Nomor 18, 2012)

1. Sanksi Produk Yang Tidak Berlebel Halal

Pasal 1 menyebutkan jika pangan dengan tidak ada kandungan unsur, bahan haram ataupun konsumsi islam terkait dengan bahan baku, penolon yang masuk darir rekayasa genetik. Makanan halal merupakan keseluruhan ragam dan kandungan unsur, bahan yang haram dan olahan dari agama.

Agama ataupun keyakinan dan tanggungjawab, dipaparkan dari Pasal 34 ayat (1) ketentuannya dengan pernyataan halal dari label, iklan dan bahan tambahan pangan. Pasal 56 dengan pemaparan aturan pelaku usaha tidak ada penjagaan kehalalan dari barang, perolehan sertifikasi dengan pidana paling sedikit lima tahun dan dendanya dua milyar.

Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 mengenai dicantmkannya tulisan halal ini, mengenai tata cara dari label makanan dengan pemaparan: (Undang-Undang Nomor 36, 2009)

a. Persetujuannya dengan dicantumkan tulisan halal dari Dirjen POM.

b. Barang makanan dari DEPKES RI.

c. Persetujuannya yang tercantum, dengan memeriksa pada kementrian, agama dan MUI.

d. Hasil penilaiannya, dengan pengeluaran fatwa dan sertifikat.

e. Persetujuannya dengan dicantumkan halal dan pemberian dari MUI.

f. Persetujuannya dengan pemberlakuan dua tahun, disesuaikan dengan regulasi.

Pelaku usaha memiliki kewajiban dari informasi yang semestinya, jujur pada keadaan.   
Pasal 8 dengan pemaparan, jika upaya yang dilakukan pelarangan, dengan dagang dan ketentuan produksi halal. Dengan pencantuman dari regulasi mengenai produk halal:

Pasal 10 :

Tiap orang dengan produksi, masuknya pangan dilakukan pengemasan wilayah indonesia, dagang dan pernyataan halal dan tanggungan wajib dari label. Pernyataan halal ini dengan pembagain dari label (Undang-Undang Nomor 33, 2014), (Peraturan Pemerintah Nomor 39, 2021)

Pasal 11:

a. dengan tujuan, dukungan yang benar dan dimaksudkan dari Pasal 10, dengan masuk pada pangan ke wilayah Indonesia, wajib dengan pemeriksaan dahulu, pemeriksaan dan kelembagaan itu dengan akreditasi undang-undang yang diberlakukan..

b. Pemeriksaannya yang dimaksudkan dengan berdasar pada acuan, penetapan oleh Menteri, saran dan kelembagaan kompetensi bidangnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 39, 2021; Undang-Undang Nomor 33, 2014)

Pasal 59 :

Pengawasan dan pelaksanaan ketentuan dari Menteri Kesehatan.

Pasal 60:

a. Pelaksanaan ketentuan itu dimaksudkan dari Pasal 59, dengan penyerahan tugas dan memeriksanya.

b. Pejabat Pemeriksa dengan ayat 1, pemilihan dan ditunjuk berdasarkan dari keahliannya.

c. Pejabat pemeriksa dengan maskdu dengan pemberhentian dari menteri. (Peraturan Pemerintah Nomor 39, 2021; Undang-Undang Nomor 33, 2014)

Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pasal 11 ayat 1dengan pernyataan yang mendasar, ketentuan dan pencantuman label dengan pendendaan sedikitnya Rp.360.000.000 dari pelanggaran itu dengan dendanya dua milyar. (Peraturan Pemerintah Nomor 39, 2021; Undang-Undang Nomor 33, 2014)

Tindakan administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang meliputi: Peringatannya tertulis, larangan pengedaran sementara waktu. Pasal 27 dengan penerbitan dari pemerintah mengenai produk halal. Pelaku usaha dengan tidak ada pencantuman produk halal dengan sertifikasi tertulisnya.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
   1. Ketentuan setiap produk pangan harus bersertifikat dan berlabel halal, karena dari setiap barang yang dilakukan pengawasan, dibuat oleh Pemerintahnya. Kewajibannya dari barang dengan pengedaran yang dilakukan lima tahun, diperbarui dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka, dengan produsen dan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas juga mengatur mengenai sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 mengenai pencantuman label halal, dengan pengenaan sanksi administrasi;
   2. Akibat hukum jika produsen mengedarkan produk pangan dengan merunjuk ketentuan dari Pasal 6, dengan pelaku usaha ini menjaga dari barang, Pasal 25 menyebutkan penjaranya paling sedikit lima tahun dan denda dua milyar.
3. **Saran**
4. Hendaknya pelaku usaha dalam produksi dan dagang ataupun pelayanan yang wajib ikut dengan produksi halal. Pernyataan halal dengan regulasi yang terncantum, mengenai penyelenggaraan bidang demi melindungi khususnya konsumen muslim;
5. Diharapkan penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik terutama dalam mengawasi peradaran produk pangan dengan memberikan sanksi tegas dan tepat terhadap pelaku usaha yang nyata-nyata tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
6. **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada.

Aminuddin, M. Z. (2016). “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand.” *SHAHIH*, *1 1*, 38.

Evianto, H. (2016). “Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar ‘Keinginan’ Melainkan Suatu ‘Kebutuhan.’ *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 63.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2015). Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam. *Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal*, 28.

Huda, M., Sekolah, D., Ilmu, T., & Iblam, H. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MELALUI JAMINAN*. *IV*(2), 198–209.

Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.

May Lim Charity. (2017). Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14 1*, 100–101.

Nasution, A. (2016). “Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen.” *Hukum Dan Pembangunan*, *XVI*, 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39. (2021). *tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

Shofie, Y. (2015). “Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Syariah 3*, 41.

Soerjono, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (1945). *UUD NRI*.

Undang-Undang Nomor 18. (2012). *tentang Pangan*.

Undang-Undang Nomor 33. (2014). *tentang Jaminan Produk Halal*.

Undang-Undang Nomor 36. (2009). *tentang Kesehatan*.

Undang-Undang Nomor 8. (1999). *tentang Perlindungan Konsumen*.

Peraturan Pemerintah Nomor 39. (2021). *tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.